
Program Denuklirisasi Korea Utara Tahun 2017 - 2018

Luthfi Achmad Wahid Nur

20150510374

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55184

luthfi.achmad.2015@fisipol.umy.ac.id

Abstrack

The Economy North Korea from Kim Il Sung to Kim Jong Un, always find a struggle this because the different of Ideology, there are more focused to finish Economy First and there are put foward to Military first, so that cant go according to the plan. Beside that there is Nuclear become a problem where it make Kim Il Sung, Kim Jong Il and Kim Jong Un very instered to development Nuclear for national interest North Korea that can be a threat or even a defense tool. Although in the end Nuclear became a problem for North Korea because make North Korea get a sanction for Economy that make North Korea become unstable, so there is need Denuclearization as a condition from Internasional World to North Korea so that can free from Economic Sanctions. Therefore must be a Denuclearization by North Korea so can fix the economy and internasional trust, moreover there is reward that North Korea get if do that.

With the North Korea Denuclearization Program in 2018 is expected that North Korea can fix the Economy and Internasional Trust.

Keyword : *Nuclear, Economy, North Korea, Denuclearization.*

Abstrak

Perekonomian Korea Utara dari masa kepemimpinan Kim Il Sung Hingga Kim Jong Un, selalu menemui kendala hal ini dari perbedaan dari Ideologi yang tidak sama, dimana ada yang lebih terfokus untuk menyelesaikan Ekonomi terlebih dahulu dan ada yang mengedepankan Militer, sehingga tidak bisa berjalan sesuai rencana. Selain itu adanya Nuklir menjadi sebuah permasalahan

dimana Nuklir membuat Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Un sangat tertarik untuk mengembangkannya untuk kepentingan nasional Korea Utara bisa menjadi alat ancaman atau menjadi pertahanan diri. Meskipun pada akhirnya Nuklir sendiri malah menjadi sebuah masalah bagi Korea Utara karena mendapatkan sanksi untuk Ekonomi dari Korea Utara sendiri menjadi tidak stabil sehingga perlu adanya sebuah Denuklirisasi sebagai sebuah syarat dari Dunia Internasional terhadap Korea Utara untuk bebas dari Sanksi – sanksi ekonomi. Untuk itu Denuklirisasi perlu dilakukan oleh Korea Utara agar bisa memperbaiki dari kondisi Ekonominya dan kepercayaan Internasional, terlebih adanya imbalan yang akan diberikan menjadi sebuah petanda bagus untuk Korea Utara melakukannya.

Dengan adanya Program Denuklirisasi Korea Utara pada tahun 2018 diharapkan Korea Utara bisa untuk memperbaiki Ekonomi serta kepercayaan Internasional.

Kata Kunci : Nuklir, Ekonomi, Denuklirisasi, Korea Utara

PENDAHULUAN

Ketika Perang Dunia terjadi Semenanjung Korea dikuasai oleh Jepang, untuk mempermudah dalam pembagian wilayah antar sekutu dibentuklah pararel 38 dan area DMZ untuk menghindari adanya pertempuran antara sekutu yang berusaha membebaskan Korea dari Jepang. Dengan adanya perang di Program Nuklir Korea Utara sendiri sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Kim Jong Il, dimana pada tahun 2003, ketika Korea Utara telah keluar dari Perjanjian Non – Proliferasi untuk pembatasan penggunaan nuklir. Sebelumnya Korea Utara berencana untuk keluar dari NPT akan tetapi membatalkan hal tersebut pada tahun 1993. Ketika masih pada perundingan di *Six Party Talk* pada tahun 2003 Korea Utara setuju untuk menghentikan pengembangan hulu ledak nuklirnya yang berjumlah 2 dengan syarat Korea Utara mendapatkan bantuan dari negara *Six Party Talk*. Meskipun demikian Korea Utara tetap melakukan uji coba Hulu ledak Nuklirnya pada tahun 2006 dan telah berhasil melakukan beberapa pengembangan Hulu ledak nuklirnya yang berjumlah dua. Ini membuat ancaman bagi Komunitas Internasional karena ketika sedang melakukan perundingan dengan *Six Party Talks*, Korea Utara justru mengembangkan Nuklirnya. Karena Korea Utara ketika sudah dijanjikan akan diberi bantuan Asing berupa paket ekonomi dan energi Korea Utara tetap melakukan beberapa uji coba nuklir.

Namun ketika Kim Jong – Un naik jabatan sebagai pemimpin Korea Utara melanjutkan Program nuklir yang telah berlangsung ketika masih jabatan oleh ayah Kim Jong Il, dan juga Kim Jong Un sekaligus mengembangkan hulu ledak nuklir yang lebih mematikan dan lebih besar dari sebelumnya. Dan pada 2015 Kim Jong Un menyatakan telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir berbahan Termonuklir yang dimana ini hanya klaim belakng saja meskipun menuai protes keras dari Dunia Internasional dan pada 6 Januari 2016, Kim Jong Un melakukan uji coba Hulu ledak nuklir pertamanya yang sukses dilaksanakan dan menuai protes keras dari dunia internasional terutama Korea Selatan yang merasakan langsung dari dampak uji coba Hulu ledak nuklir tersebut dengan gempa berkekuatan 5.6 Magnitudo.

Setelah berhasil uji coba hulu ledak nuklir dengan daya dan bahan baru pada 15 Maret 2016 Korea Utara ingin mengembangkan lagi hulu ledak nuklirnya dan melakukan uji coba lagi yang ini membuat dunia internasional khawatir terkait dengan perkembangan hulu ledak nuklir di Korea Utara. Bahkan Kim Jong Un juga mengatakan telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir berbahan Hidrogen yang berhasil diuji coba dan berhasil mengembangkan rudal balistik antar benua.

Puncak dari Korea Utara adalah ketika rudal balistik tersebut melintasi wilayah Jepang dimana dilakukan protes keras terhadap uji coba tersebut oleh Korea Selatan dan Jepang yang bisa terancam oleh Rudal Korea Utara dan ancaman keras dari Dunia Internasional. Dan setelah melakukan uji coba nuklir di sepanjang 2017, pada akhir tahun 2017 secara mengejutkan Korea Utara dan Korea Selatan berhasil untuk bernegosiasi secara damai terkait dengan Denuklirisasi Semenanjung Korea, hal ini disambut baik dengan pertemuan mereka untuk pertama kalinya setelah ketegangan yang terjadi selama 2017 terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara.

Ada alasan tersendiri kenapa Korea Utara ingin berdamai dengan Korea Selatan dimana ada dugaan bahwa ledakan uji coba hulu ledak nuklir Korea Utara pada 3 September tahun lalu yang menyebabkan fasilitas Punggye-ri rusak dan dikhawatirkan bencana terjadi kebocoran nuklir yang berdampak terhadap Lingkungan sekitar, Rusaknya fasilitas Punggye-ri menyebabkan kebocoran pengayaan uranium yang bisa berakibat radiasi mematikan dari nuklir tersebut. Kondisi Ekonomi Korea Utara yang tidak stabil karena sanksi ekonomi dari Dunia Internasional. Dan inilah yang membuat Korea Utara ingin melakukan denuklirisasi dan berdamai dengan Korea Selatan

Sementara dari pihak Korea Selatan rencana untuk berdamai dengan Korea Utara sudah direncanakan oleh Moon Jae – in ketika masih menjadi Calon Presiden Korea Selatan, dimana ia berjanji akan menggunakan cara dialog untuk mengahapi Korea Utara dalam cara untuk melakukan perdamaian. Cara yang digunakan Korea Selatan adalah mengajak Korea Utara untuk terlibat dalam Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan dan pertukaran budaya yang bisa membuat Korea Utara lebih terbuka.

KERANGKA TEORI

Untuk mendukung dari penelitian ini maka penulis menggunakan Teori dan Konsep dalam Hubungan Internasional untuk membantu menjelaskan bagaimana tentang fenomena yang terjadi di semenanjung Korea

1. Konsep Kepentingan Nasional, Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik” (Morgenthau, 1951). Disini Konsep dari Kepentingan Nasional bisa menjelaskan atau membantu dari fenomena yang terjadi di Semenanjung Korea, dimana Korea Utara memiliki kepentingan tersendiri dari alasan Korea Utara untuk berdamai dan Melakukan Denuklirisasi, ada beberapa alasan
 - a) Korea Utara memiliki kepentingan dengan Amerika Serikat terkait dengan masalah Denuklirisasi, kepentingannya adalah Amerika ingin program nuklir dari Korea Utara dihentikan agar tidak menyebabkan masalah global dan perang yang tidak penting dimasa depan. Dan Korea Selatan juga akan membantu jika ingin Korea Utara menghentikan dari program nuklirnya. Dan adanya bantuan atau iming – iming bantuan ekonomi dari Amerika Serikat juga menjadi faktor yang membuat Korea Utara setuju untuk melakukan program Denuklirisasinya agar bisa memperbaiki ekonominya.
 - b) Korea Utara dan Korea Selatan ingin melakukan perdamaian dan kerjasama antar kedua negara, dimana Korea Utara jika menghentikan dari progam nuklirnya dan denuklirisasi akan membuat Korea utara dapat bantuan dari Korea Selatan dalam bentuk ekonomi serta dalam bentuk kerjasama untuk memajukan kedua negara untuk lebih damai lagi. Pembicaraan antara kedua Korea sudah dimulai sejak awal tahun 2018 dimana ada indikasi kedua Korea untuk melakukan perdamaian di Semenanjung Korea dan melakukan hubungan antar kedua negara yang lebih baik. Awal pertemuan pada tahun 2018 menunjukkan keterbukaan dari Korea Utara terhadap Korea Selatan yang dimana kedua negara setuju untuk memulai hubungan yang baru dari kedua negara agar

menciptakan sebuah kedamaian di Semenanjung. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Korea Utara yang menerima permintaan dari Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi di dalam Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan, dan bahkan ada pertukaran budaya di antara kedua menunjukkan keseriusan dari kedua Korea untuk menciptakan perdamaian yang baru di semenanjung Korea.

Dimana untuk menghentikan program nuklir Korea Utara agar bisa melakukan perdamaian di Semenanjung Korea dan membantu Korea Utara dalam dunia Internasional atau bantuan untuk Korea Utara dalam segi Ekonomi, Budaya, dan Militer. Dimana menteri luar negeri Rusia ketika bertemu dengan Kim Jong Un memberi tahu bahwa jika dia menghentikan dari program nuklirnya maka Korea Utara akan terhindar dari sanksi sanksi yang berat. Ekonomi Korea Utara sendiri tidak bisa tumbuh dengan bagus karena sanksi – sanksi yang diberikan oleh beberapa negara dan dunia internasional sehingga membuat Korea Utara yang mengandalkan ekspor bahan – bahan tambang ke China menjadi ditolak karena adanya sanksi yang membuat Korea Utara tidak bisa melakukan ekspor. Untuk itulah Korea Utara melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan beberapa negara dan juga PBB untuk menghapus sanksi tersebut jika Korea Utara melakukan atau setuju untuk denuklirisasi dan diharapkan bisa membuat ekonomi Korea Utara bisa lebih baik dan adanya bantuan ekonomi juga menjadi harapan buat Korea Utara.

2. Teori Pembuat Keputusan Luar Negeri, menurut William D. Coplin, , tindakan politik luar negeri bisa dipandang sebagai akibat dari tiga faktor yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri, bagaimana keadaan dari kondisi politik suatu negaranya, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya yang berdampak kepada pengambilan keputusan politik luar negeri. Kedua, kondisi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau keamanan. Dan ketiga, konteks internasional, yakni situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
 - a. Situasi Politik Domestik, dimana politik domestik sangat mempengaruhi sebuah kebijakan dari politik luar negeri suatu negara, Korea Utara yang terkenal karena negara yang tertutup dari dunia luar saat ini mulai membuka diri terhadap dunia internasional dan kondisi politik dari Korea Utara sangat menentukan bagaimana kebijakan dari luar negeri Korea Utara yang mulai melakukan program denuklirisasi, dan ini menjadi

sebuah langkah baru untuk Korea Utara untuk melakukan program perdamaian di semenanjung Korea.

- b. Kondisi Ekonomi dan Militer. Kondisi Ekonomi dari Korea Utara pasca sering mengembangkan hulu ledak nuklirnya mengalami beberapa perubahan dari adanya sanksi Embargo Ekonomi oleh Internasional terhadap Korea Utara yang berdampak buruk terhadap ekonomi Korea Utara, selain itu Embargo Ekonomi juga semakin lama mulai menggigit Korea Utara, karena Korea Utara yang mengandalkan hasil Ekspor berupa Tekstile, Batu Bara, dan Makanan Laut mulai dibatasi hasil eksportnya dan ini sangat berpengaruh terhadap GDP Korea Utara. Selain itu Ekonomi Korea Utara yang juga menjadi bagian dari prioritas Kim Jong Un untuk mengembalikan keadaan Korea Utara, selain itu bantuan Ekonomi juga di iming – imingkan ke Korea Utara jika Korea Utara mau melakukan denuklirisasi, Amerika Serikat juga ingin membantu perekonomian Korea Utara dan Korea Selatan juga akan memberi bantuan ke Korea Utara agar perdamaian bisa berjalan lancar di Semenanjung Korea.

Sementara itu dalam segi Militer Korea Utara yang memiliki Senjata Nuklir dan peralatan militer lain dinilai sudah cukup kuat, akan tetapi masih kalah kuat karena gabungan dari kekuatan Korea Selatan dan Amerika Serikat dan sekutu lainnya yang mendesak dan mengancam Korea Utara dinilai menjadi faktor yang membuat Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi agar tidak Korea Utara di invasi. Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat sering melakukan latihan perang bersama yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan militer mereka ke Korea Utara dan membuat Korea Utara untuk berpikir dua kali dalam melakukan aksinya.

- c. Konteks Internasional, dari Konteks Internasional program denuklirisasi sendiri bisa dilakukan atau didesak oleh beberapa negara *Super Power* dan juga desakan dari negara *Six Party Talks* yang menginginkan bahwa Korea Utara untuk melakukan Denuklirisasi, selain itu hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang sudah mulai membaik dari adanya perkembangan pertemuan awal tahun dan pertemuan Kedua Preisden dari Kedua Korea ini yang menjadi sinyal terhadap Korea Utara untuk melakukan Denuklirisasi sendiri, Korea Selatan Sendiri berjanjin untuk melakukan cara Dialog atau *Soft Diplomacy* ke Korea Utara agar berhasil dan mau melakukan Perdamaian di Semenanjung Korea.

Selain itu desakan dari dari negara *Super Power* seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat menyudutkan Korea Utara dalam program Denuklirisasi sendiri karena

negara – negara besar ingin Korea Utara lepas dari sanksi ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri tanpa nuklir yang bisa menimbulkan dari perang nuklir yang berbahaya, selain itu langkah konkrit yang dilakukan Korea Utara dalam program denukliriasi adalah Korea utara mengizinkan media asing untuk meliputi penghancuran tempat uji coba nuklirnya yang menandakan bahwa Korea Utara siap untuk melakukan denukliriasi.

PEMBAHASAN

Pasca Perang Korea berakhir Korea Utara mengalami kerugian sebesar 420 triliun *won*, yang dimana kerugian ini lebih besar dibandingkan dengan negara tetangganya Korea Selatan yang mana kerusakan ini lebih tinggi daripada GDP Korea Selatan pada waktu itu. Korea Utara sendiri menggunakan landasan ekonomi dari Uni Soviet dimana tanah milik musuh dan para *Chongbo* disita oleh pemerintah Korea Utara dan dengan dalil akan dibagi secara rata lewat Dewan Rakyat. Bahkan pengusaha yang mendukung pemerintahan Jepang juga diambil secara paksa. Ketika Korea Utara merombak atau mencoba bangkit dari pasca – perang Korea, Korea Utara lebih mengembangkan ke Industri berat terutama tekstil, bahan Kimia dan penggunaan mesin diawal dari perombakan ekonomi ini Korea Utara mengalami peningkatan yang sangat pesat dimana ekonomi Korea Utara dengan mengembangkan Industri berat mengalahkan Korea Selatan hingga tahun 1974. Meskipun dana yang didapatkan oleh Korea Utara dari Blok Komunis sebesar \$ 3 triliun dari dana tersebut Korea Utara sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi Industrinya.

Meskipun mengalami kesusahan dalam mengembangkan sistem sosialis dan hampir mengalami stagnan pada akhir 1970an. Selain itu alasan kuat yang membuat Korea Utara menjadi lebih maju adalah adanya ideologi baru yang diterapkan oleh pemimpin Korea Utara Kim Il Sung yang mana menggunakan ideologi *Juche*. Ideologi ini membuat Korea Utara ekonominya pada tahun 1950an bisa bersaing dengan Korea Selatan, *Juche* sendiri memiliki makna otonomi dan kemandirian, dimana Kim Il Sung mendeklarasikan ini dalam pidatonya pada Desember 1955. Selain itu Korea Utara juga melakukan kerjasama luar negeri untuk mengembangkan ekonomi dan industri mereka selama kepemimpinan Kim Il Sung.

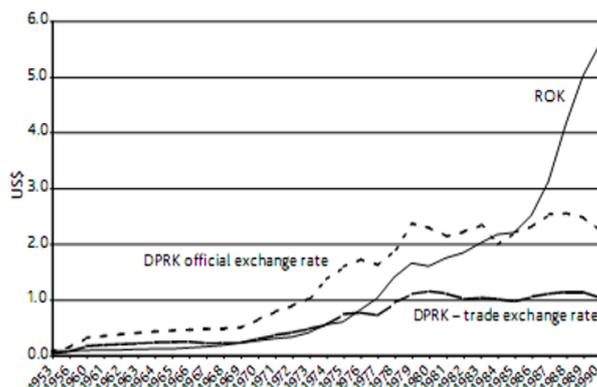
Pada era Kim Il Sung Pada Masa Kepimpinan Kim Il Sung Korea Utara berusaha bangkit dari masa keterpurukan pasca – Perang Korea karena negaranya mengalami kerusakan terbesar dan kerugian terbanyak setelah perang. Oleh karena itu ketika Kim Il Sung memimpin

negaranya dia menerapkan kebijakan dari sistem ekonomi dan politik sosialis. Dan mengenalkan ideologi baru yaitu *Juche* selain itu kebijakan dari Kim Il Sung yang melakukan kerjasama ekonomi dan menerima bantuan dengan negara Komunis lainnya dan mempertahankan diri dari kekuatan militer yang ada. Kim Il Sung melakukan beberapa kebijakan untuk mengembalikan ekonomi negaranya. Pertama, Korea Utara pada masa Kim Il Sung melakukan rencana pembangunan ekonomi pada tahun 1953 ada 3 fase rencanan yang dilakukan untuk memperbaiki ekonominya. Persiapan untuk melakukan rehabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Melakukan rencana pembagunan 3 tahun (1954 - 1956) untuk mengembalikan kondisi ekonomi sebelum perang terjadi lagi di semua cabang. Rencana 5 tahun (1957 - 1961) rencana mendanai untuk industrilisasi, Terutama dalam Industri berat.

Kebijakan yang dilakukan oleh Kim Il Sung ini dinilai sangat berhasil terhadap pembangunan ekonomi di Korea Utara, Korea Utara melakukan banyak nasionalisasi terhadap industri – industri sisa peperangan dari tangan pengusaha. Dan yang membuat Korea Utara menjadi lebih berkembang adalah pertumbuhannya dalam mengembangkan Industri Besar yang sangat pesat, dimana Korea Utara bisa melewati ekonomi Korea Selatan dengan sangat pesat, dalam jumlah pabrik Industri besar Korea Utara jauh lebih unggul dan ini yang membuat ekonomi Korea Utara maju pesat. Bahkan GDP Korea Utara pada masa pasca perang Korea ketika dalam perbaikan ekonominya, melebihi dari Korea Selatan.

Selain itu alasan Korea Utara untuk lebih mengutamakan dalam pembagunan Industri besar adalah untuk menompang dari produksi – produksi kemiliteran juga dan perlengkapan untuk teknologi yang akan di buat untuk produksi senjata dan pabrik, penekanan dalam produksi berat seperti industri Kimaia, Besi, Baja dan peralatan mesin dilakukan dan untuk diekspor kenegara timur tengah, dan hingga tahun 1970an Korea Utara bahkan bisa memimpin dalam segi ekonomi dan pendapatan yang didapatkan dibandingkan dengan Korea Selatan.

Grafik 2.1 Pendapatan Ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan dari tahun 1953 - 1990



Sumber : Tim Beal. North Korea The struggle Against American Power. 2005.

Dalam kesuksesannya program yang direncanakan oleh Kim Il Sung sendiri terbilang luar biasa dimana program yang 3 tahun pembangunan (1954 – 1956) terbilang sangat berhasil. Pada 18 Februari 1957, Korea Utara telah menyatakan bahwa program 3 tahun yang dilakukan telah sukses melebihi batas yang diharapkan oleh Korea Utara sendiri, mereka menyatakan produksi industri dan pertanian mereka telah siap atau sudah berkembang dari sebelumnya pasca perang, selama periode ini investasi yang dilakukan di Korea Utara lebih diutamakan terhadap ke Industri dan 81.1 % investasi industri dilakukan ke industri berat. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya campur tangan dari negara – negara *Sino – Soviet* yang mendukung Korea Utara dalam hal ekonomi dan dan bantuan teknis yang diberikan.

Kesuksesan Korea Utara dalam ekonomi berlanjut ke program ketiganya, yaitu rencana pembagunan jangka 5 tahun (1957 – 1961). Pada tahun 1957 Kim Il Sung melakukan rencana program pembagunan dalam jangka 5 tahun, program 5 tahun ini berbeda dengan program 3 tahun yang sebelumnya dimana, dalam 5 tahun ini, Korea Utara melakukan mengkonsolidasikan fondasi ekonomi sosialisme di Korea Utara dan menyelesaikan masalah – masalah sosial yang terjadi di Korea utara seperti, masalah makanan, masalah pakaian dan masalah perumahan yang dialami oleh rakyat Korea Utara sendiri, bantuan sendiri dari negara blok komunis pun berkurang oleh karena itu Korea Utara pun melakukan penghematan untuk dari pembagunan Industri dan penghematan pengeluaran pendapatan nasional sebesar 25%. Sebagai ganti dari penghematan dari anggaran Korea Utara, Kim Il Sung melakukan gerakan “*Chollima* atau *Flying Horse Movement*”, gerakan ini hampir mirip dengan gerakan yang

dilakukan oleh Republik Rakyat China pada masa Mao Zedong dengan nama, “ *Great Leap Forward*”, yang pada dasarnya adalah mempercepat proses Industrilisasi dan meningkatkan produksi pertanian serta mengatur populasi masyarakat.

Berdasarkan laporan dari pemerintah Korea Utara bahwa program 5 tahun ini dianggap berhasil, karena dalam hasilnya sendiri program ini berjalan sangat cepat hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun dan setengah tahun saja. Dan beberapa hasil dari program ini dicapai dalam bidang industri berat dan tingkat produksi dari industri ringan dan pertanian. Dan berdasarkan laporan perbandingan dengan ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan pada masa itu sangatlah berbeda jauh dimana kondisi perekonomian Korea Utara lebih maju karena adanya hasil dari pembangunan besar – besaran dari Industrilisasi dan program yang dilakukan oleh Kim Il Sung. Diperkirakan pendapatan Korea Utara pada tahun 1959, GDP per kapita Korea Utara adalah \$140, dan Korea Selatan sebesar \$81.

Keberhasilan dari Korea Utara sendiri tidak lepas dari adanya perkembangan yang sangat pesat di Industri berat dan pada tahun 1958 kolektivisasi dari pertanian sudah selesai, dan semua kepemilikan pribadi dalam industri dan perdagangan dihapuskan, Pyongyang mengklaim bahwa pada tahun 1960 Korea utara telah mencapai sebuah negara sosialis – industrial – pertanian.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan

Items	North Korea	South Korea
National income	21.0%	4.9%
National income per capita	17.1%	2.7%

Sumber : penghitungan perkembangan ekonomi Korea Utara dari perkiraan angka di Pong S. Lee, An Estimate of North Korea's National Income, “ *Asian Survey*”, Vol 12, No. 6. (Juni 1972), Hal. 518 – 26.

Namun pada tahun 1976 Korea Utara tidak bisa bersaing lagi dengan Korea Selatan dalam ekonominya, karena Korea Selatan sudah mulai meninggalkan Korea utara yang mana

memiliki mitra dagang yang lebih luas dan penggunaan mata uang *Dollar* dalam perdagangan Internasional, sedangkan Korea Utara masih menggunakan mata uang *Won*.

Meskipun Korea Utara melakukan rekonstruksi dalam perkembangan industri pasca perang, akan tetapi kondisi warga Korea Utara sendiri tidak terjamin oleh adanya perkembangan industri tersebut, karena kondisi dari kota – kota di Korea Utara sangat tidak layak atau lusuh dan sangat terbelakang dalam perkembangannya.

Berdasarkan laporan dari *Korean Trade Promotion Agency* (KOTRA) untuk perdagangan Korea Utara, sejak tahun 1970an Korea Utara sudah melakukan kerjasama luar negeri dengan beberapa negara lain, untuk membantu dalam hal ekonomi dan teknologi. Mitra utama dalam perdagangan luar negeri Korea Utara sendiri adalah Uni Soviet dan China, dimana kedua negara ini mendominasi dalam hal pasokan ekonomi ke Korea Utara, selain itu ada Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa dan negara Timur tengah.

Sebagian perdagangan internasional yang dilakukan oleh Korea Utara dikarenakan motivasi mereka untuk kebutuhan teknologi dan daya saing dengan Korea Selatan dalam industri, oleh karena itu pabrik dan teknologi di Korea Utara di impor dari Jepang dan Eropa, dan impor teknologi ini membuat keuangan dari Korea utara mengalami kesusahan pembayaran kredit jangka pendek, dan adanya dampak dari tidak stabilan harga minyak dan resesi di barat, membuat utang Korea Utara membengkak pada tahun 1976 diperkirakan utang Korea Utara sebesar, \$ 2 miliar, dan hampir \$ 1 miliar terutang ke Barat, Jepang dan \$ 1 miliar lagi ke USSR, dan China.

Korea Utara juga membentuk sebuah *Joint Venture Law* tahun 1984, untuk memperluas dan mengembangkan pertukaran ekonomi dan teknis dan kerjasama dengan banyak negara lainnya. Dan juga menerapkan sebuah zona khusus ekonomi (*SEZ*) *Rajin – Sonbong* pertama di Korea Utara pada tahun 1991 untuk menarik investasi ke daerah Korea Utara maka dibentuklah zona ekonomi khusus.

Akan tetapi meskipun sudah dibentuk zona khusus ekonomi di Korea Utara, investasi yang datang ke *SEZ* tidak mengalami peningkatan secara khusus, dikarenakan keterpencilannya, infrastruktur yang buruk, dan risiko nyata atau risiko yang dirasakan. Meskipun daerah tersebut dinilai strategis oleh Korea utara karena daerah tersebut menghubungkan antara Rusia dengan negara Asia, karena itu Korea Utara membuka peluang untuk membentuk *SEZ* agar dapat membantu investasi ke Korea Utara terutama dari Rusia, China dan negara Asia lainnya.

Grafik 2.2 Jumlah Perdagangan Luar Negeri Korea Utara dan Korea Selatan



Sumber : Mou Inter Korean(2003)

Kebijakan dari Kim Il Sung yang mengedepankan pembangunan ekonomi untuk Korea Utara dinilai sangat bagus dan sangat membantu, terutama sesuai dengan filosofi dari ideologi *Juche*, serta keterbukaan Korea Utara dengan Dunia Internasional serta bantuan dari negara Blok Komunis membuat Korea Utara pada masa Kim Il Sung menjadi sangat maju dalam hal pembangunan Ekonomi serta perdagangan yang dilakukan.

Ketika terjadinya keruntuhan dari Uni Soviet pada tahun Desember 1991 membuat ekonomi dari Korea Utara menjadi jatuh dan tidak bisa bertahan, hal ini membuat Korea Utara mengalami kemunduran terhadap pendapatan nasionalnya yang mana mengalami kejatuhan sebesar 50%, diantara tahun 1994 dan 1998.

Kedadaan Korea Utara diperparah dengan adanya bencana kelaparan yang melanda negara serta tidak pastian ekonomi di Korea Utara, kejadian ini disebut *Arduous March*, serta kematian dari Kim Il Sung dan perpindahan politik ke Kim Jong Il di Korea Utara membuat keadaan menjadi tidak stabil, bahkan tidak ada tindakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi disana.

Keadaan Korea Utara semakin memburuk karena adanya sebuah bencana yang melanda negara tersebut sejak tahun 1990, hingga melumpuhkan ekonomi Korea Utara, dimana lahan pertanian, bahan bakar, dan peralatan pertanian rusak akibat adanya banjir besar yang menlanda pada tahun 1995.

B. Masa Kepemimpinan Kim Jong Il.

Kim Jong Il adalah pemimpin kedua setelah ayahnya Kim Il Sung meninggal dunia, dan ia menggantikan posisi dari Kim Il Sung sebagai pemimpin Korea Utara sendiri. Kim Jong Il sendiri tetap melanjutkan dari Ideologi *Juche* dari ayahnya Kim Il Sung, akan tetapi yang membedakan antara ideologi Kim Il Sung dengan Kim Jong dalam ideologi *Juche* sendiri adalah, Kim Il Sung lebih mengedepankan ekonomi dan industrilisasi, sedangkan Kim Jong Il lebih mengedepankan pembangunan Militer, *Songun – Politics* (mengutamakan Militer).

Prinsip dari Korea Utara yang menggunakan era pertama militer ini, adalah “ *the era where all problems occurred in the process of revolution and reconstruction should be solved by the militaryfirst principle.*” Memberikan prioritas utama terhadap militer dan memperkuat urusan militer dan memberi kelebihan tersendiri ke perkembangan militer. Ini merupakan sebuah propaganda yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Ide baru dan cerdi dari Kim Jong Il yang mengutamakan segi militer.

Kebijakan dari Kim Jong Il yang menerapkan prinsip militer sebagai pembangunan utama tersebut membuat Korea Utara menjadi lebih represif terhadap dunia luar, serta memberi pandangan terhadap warga Korea Utara bahwa melalui pembangunan militer Korea Utara bisa lebih maju dan sejahtera. Masyarakat Korea Utara sendiri memiliki sifat yang lebih keras terhadap dunia luar, dan dengan sifat dari masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap dunia luar membuat pemerintah Korea Utara dapat mempertahankan kekuasaanya.

Ketika Kim Jong Il menjadi pemimpin dari negara tersebut, Korea Utara sendiri mengalami kondisi ekonomi yang parah dikarenakan beberapa faktor yang melanda negara tersebut, dimana adanya keruntuhan dari Uni Soviet membuat keadaan tidak stabil di Korea Utara, serta adanya bencana alam yang melanda Korea Utara membuat negara tersebut menjadi kacau. Terlebih lagi adanya bencana kelaparan melanda Korea Utara “*Arduous March*” membuat negara tersebut menjadi tidak stabil, dan tidak ada tindakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan perkembangannya membuat Korea Utara menjadi Kacau. Dengan adanya

bencana yang melanda pada tahun 1995 dimana adanya banjir besar dan angin membuat

Total Humanitarian Assistance to North Korea, 1995 – 2002

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Total
Korea									
Government	232.0	3.1	26.7	11.0	28.3	78.6	70.5	83.8	533.8
Private Sector	0.3	1.6	20.6	20.9	18.6	35.1	64.9	51.2	213.1
Subtotal	232.3	4.6	47.2	31.9	46.9	113.8	135.4	134.9	746.9
International Community	55.7	97.7	263.5	302.0	359.9	181.8	357.3	257.3	1,875.0
Total	287.9	102.3	310.7	333.8	406.8	295.5	492.6	392.2	2,621.8

Source: Ministry of Unification (2002), *North South Trade and Cooperation in 2002*, Seoul. Assistance is in millions of US dollars.

keadaan Korea Utara kekurangan makanan.

Tabel 2.2 Jumlah Bantuan Kemanusiaan Untuk Korea Utara

Pada tahun 1995 Korea Utara meminta bantuan ke dunia Internasional untuk meminta bantuan kemanusiaan, *World Food Programme* (WFP), UNICEF, dan organisasi PPB, serta organisasi non pemerintah merespon dengan memberi bantuan berupa makanan serta bantuan kemanusiaan.

Meskipun lebih mengutamakan dalam segi militer, akan tetapi Kim Jong Il tetap melakukan kerja sama internasional dengan negara – negara lain, untuk membantu dalam proses perbaikan ekonomi pasca tahun 1990an dimana kondisi Korea Utara mengalami kesusahan dalam hal ekonomi dan makanan.

Selain itu Korea Utara juga membuka *SEZ* baru di Sunuiju, Gunung Kumgang dan Kaesong. Dimana ketiga daerah direncanakan untuk menarik investasi ke Korea Utara agar dapat membuka peluang bisnis disana, meskipun pada akhirnya rencana Daerah Khusus Adminitstasi Sunuiju terhambat karena ada masalah dengan otoritas China. Akan tetapi 2 Zona Ekonomi khusus lainnya Gunung Kumgang dan Kaesong menjadi minat investasi bagi perusahaan Korea Selatan, *Hyundai*, dimana pimpinan Hyundai Chung Mong – Hung. Untuk menciptakan sebuah daerah industri di Kaesong Hyundai telah menyiapkan rencana untuk membangun tempat ekspor bagi Korea Selatan disana, dan pertukaran teknologi dan barang antar kedua negara, dan menawarkan sebuah bantuan terhadap Korea Utara sebuah pembagunan penampungan air, listrik dan fasilitas komunikasi.

Akan tetapi semua rencana dari hal tersebut gagal dijalankan ketika pendiri dari Hyundai meninggal dunia, dan pembicaraan tersebut pun diberhentikan sementara. Dan dibikin rencana lain untuk kedepannya.

Berdasarkan laporan dari KOTRA (2003), ada 35 perusahaan dari China, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia dan Singapura yang melakukan investasi di Korea Utara, dengan nilai total hampir \$ 120 miliar di tahun 1999, ini tidak bisa membuat Korea Utara menjadi lebih maju, dikarenakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il lebih mengutamakan pembangunan militer lebih utama, sehingga membuat keadaan Korea Utara menjadi lebih parah.

Keseriusan dari Korea Utara ketika membangun kekuatan militer pada masa Kim Jong Il dengan cara mengembangkan Nuklir ditunjukkan ketika dari NPT (Perjanjian Non – prolifersi) pada 1 Oktober 2003, dan mengoperasikan kembali fasilitas nuklirnya. Korea Utara memberi ancaman kepada Amerika Serikat jika tidak bisa memperbaiki hubungan bilateral kedua, karena tidak pasti dalam pemberian reaktor air ringan sebagai tenaga listrik untuk Korea Utara yang dikembangkan oleh barat.

Setelah mereka mereka mengaktifkan kembali dari fasilitas nuklir yang mereka kembangkan secara diam – diam, dan mereka memberikan sebuah ancaman terhadap Amerika Serikat untuk memberi bantuan berupa ekonomi sebesar \$ 1 miliar pertahun, namun perundingan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat. Korea Utara pun juga memberi sebuah kesempatan ke Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa, Korea Utara akan menghentikan program nuklirnya jika satelit milik Korea Utara diluncurkan ke luar angkasa, dan tawaran ini pun juga diberikan terhadap Amerika Serikat.

Korea Utara pun ikut terlibat dalam pembicaraan 6 negara “ *Six Party Talk*” untuk membahas perkembangan dari nuklir Korea Utara, *Six Party Talks* sendiri terdiri dari Rusia, Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Utara dan Korea Selatan. Pembicaraan pertama kali pun dilakukan di Beijing untuk membicarakan perbaikan hubungan antar Korea Utara dengan Amerika Serikat serta adanya keinginan dari Korea Utara untuk melanjutkan kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu untuk memberikan sebuah reaktor ringan air untuk keperluan energi Korea Utara dan juga masalah untuk melanjutkan bantuan internasional terhadap Korea Utara terkait dengan Makanan, Energi, dan pengiriman minyak. Korea Utara pun akan menghentikan dari program Nuklirnya jika bantuan diberikan dan sanksi juga dicabut.

Korea Utara tetap melanjutkan dari pengembangan nuklirnya hingga tidak pastian dari *Six Party Talks* karena keinginan dari Korea Utara yang agar bisa menghentikan program nuklirnya. Puncaknya ketika Korea Utara meluncurkan nuklir pertama mereka pada tahun 2006 dan mendapatkan kencaman keras dari dunia internasional karena ketidak konsisten dari Korea Utara untuk masalah denuklirisasi yang sedang dibahas di *Six Party Talks*, akhirnya pun sanksi untuk Korea Utara dikeluarkan pada 14 Oktober 2006 setelah Korea Utara meluncurkan nuklir pertamanya pada 9 Oktober 2006. Sanksi dari Dewan Keamanan PBB, berupa resolusi 1718 yang terdiri dari beberapa poin :

- a) Korea Utara harus tidak melakukan uji coba lagi terhadap senjata rudal balistik dan uji coba Hulu ledak nuklirnya. Serta menghentikan dari program nuklirnya secara lengkap dan bisa diverifikasi dengan benar.
- b) Korea Utara harus kembali ke *Six Party Talks*, tanpa prasyarat
- c) Pengiriman kargo menggunakan kapal laut dapat diperiksa untuk memastikan adanya senjata nuklir atau senjata pemusna massal lainnya.
- d) Melarang untuk adanya ekspor dan impor ke Korea Utara terkait dengan jenis kendaraan tempur “ Tank, Helikopter, kendaraan tempur lapis baja, rudal dan terkait suku cadang yang mendukung militer” yang dapat diidentifikasi oleh komite sanksi.
- e) Melakukan pembukaan aset di luar negeri terkait dengan program nuklir Korea Utara dari individu dan perusahaan serta melakukan pelarangan perjalanan internasional ke Korea Utara.
- f) Anggota PBB tidak boleh melakukan ekspor ke barang mewah ke Korea Utara.

Sanksi untuk Korea Utara pun ditambah lagi ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya kedua dan ini membuat Korea Utara tidak bisa melakukan apa – apa terhadap ekonominya dan perkembangan nuklirnya, karena sanksi kedua dari DK PBB, resolusi 1874 memberikan perintah untuk menghancurkan kapal yang diduga bermuatan untuk pengembangan nuklir dan melakukan embargo senjata ke Korea Utara. Hingga ambisiusnya dari Kim Jong Il yang lebih mengutamakan pembangunan dari militer ketimbang dari pembangunan ekonominya, pada 2008 Korea Utara dikabarkan telah membeli sebuah senjata yang senilai \$ 65 Juta, hanya dalam waktu 5 tahun saja, ini menunjukkan dari keseriusan dari Korea Utara untuk mengembangkan militernya ketimbang ekonomi dan kondisi rakyat Korea Utara yang kelaparan.

Sanksi yang didapatkan di rezim Kim Jong Il sendiri membuat Korea Utara menjadi tidak berdaya ketika sedang mengembangkan nuklirnya dan sedang terjadi krisis makanan, keambisiusan dari Kim Jong Il yang menggunakan ideologi *Juche* dan politik *Songun* dalam mengembangkan kekuatan militer yang diutamakan membuat Korea Utara dalam segi ekonomi tidak berdaya, meskipun dalam segi militer Korea Utara memiliki kekuatan untuk memberi ancaman kepada dunia internasional terkait dengan pengembangan nuklirnya, akan tetapi semua tidak berarti ketika Korea Utara terkena sanksi ekonomi dan membuat kerterpurukan negaranya.

C. Masa Kepemimpinan Kim Jong Un

Masa kepemimpinan Kim Jong Un dimulai ketika ia menggantikan mendiang pamanya Kim Jong Il pada tahun Desember 2011. Sebelum Kim Jong Un menjadi pemimpin tertinggi di Korea Utara, Kim Jong Un sendiri telah menerima pendidikan dari pamanya terkait masalah militer, dia diberikan pengetahuan dan diajarkan tentang pengembangan militer dan senjata nuklir yang sedang dikembangkan oleh Korea Utara pada waktu itu, dan juga diberi pemahaman tentang Ideologi dari Kim Jong Il "*Songun – Polictics*" yang mana untuk meneruskan dari pemahaman dari Kim Jong Il kepada Kim Jong Un.

Pada 28 September 2010, ketika acara dari Konferensi ketiga Partai Buruh Korea (*KWP*), Kim Jong Un diangkat menjadi beberapa posisi penting di partai komunis tersebut, ia dipromosikan menjadi Jendral bintang 4 di Tentara Rakyat Korea, meskipun Kim Jong Un memiliki sedikit pengalaman di bidang militer, selain itu Kim Jong Un pun ditunjuk menjadi wakil ketua Komisi Militer Pusat, partai yang berkuasa dan otoritas tertinggi dari militer yang dipegang oleh pamanya sendiri, dan juga Kim Jong Un dipromosikan menjadi anggota Komite Sentral Partai.

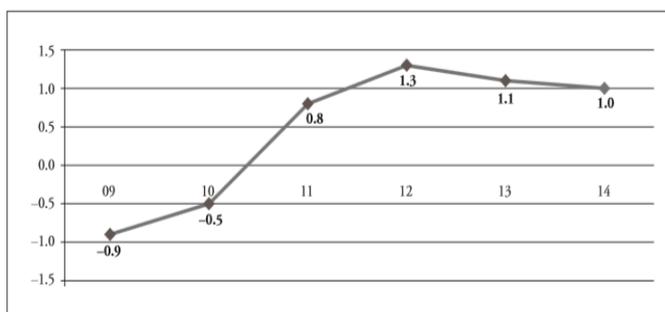
Kim Jong Un sendiri memiliki ideologi baru, yaitu ideologi *Byungjin*, sebuah ideologi yang menggabungkan antara ideologi para pendahulu dari Keluarga Kim, ideologi ini menggabungkan antara Ideologi Kim Il Sung, yang lebih memprioritaskan dari ekonomi dan juga ideologi *Songun* dari Kim Il Sung. Kim Jong Un pun pada 2013 mengumumkan ideologi *Byungjin*, dimana ideologi ini lebih memperhatikan dari segi ekonomi dan militer terutama dalam pengembangan nuklirnya juga. Kim Jong Un pun dalam pengembangan militer mengutamakan dalam pengembangan dalam Rudal Balistik dan juga program nuklir. Selain itu dalam "*Byungjin*", Kim Jong Un menegaskan bahwa Korea Utara juga bisa menggunakan nuklir sebagai alat perdamaian atau juga alat militer dan juga pengembangan luar angkasa

dijadikan program dalam militernya, bisa menjadi tujuan damai atau pun tujuan militer, Korea Utara bisa saja menggunakan semua itu sesuai dengan keinginan mereka apa mereka ingin tujuan damai atau tujuan militer.

Kim Jong Un pun juga memperhatikan dari segi ekonomi negaranya juga, kebijakan dari Kim Jong Un dalam ekonomi sendiri untuk memperbaiki kondisi pangan dan standar kehidupan di Korea Utara, meskipun data dari Korea Utara tidak begitu akurat akan tetapi ekonomi Korea Utara bisa diperkirakan oleh beberapa instansi internasional. Korea Utara semenjak dipimpin oleh Kim Jong Un pada tahun 2011 perekonomian Korea Utara menunjukkan hal positif dalam perkembangannya, berdasarkan dari laporan *Bank Of Korea*, perekonomian Korea Utara dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami peningkatan yang bagus dalam tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Utara,

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Korea Utara Pada Masa Kim Jong Un

Figure 1: Economic Growth Rates of North Korea
(unit: %)



Source: Bank of Korea, "The Estimation Results on the Economic Growth Rate of North Korea in 2014," 2015.

Melalui data tersebut pertumbuhan ekonomi Korea Utara membawa ke masa yang lebih baik semenjak tahun 2009, terutama ketika pergantian kepemimpinan ke Kim Jong Un dimana semenjak 2011 ekonomi Korea Utara mulai membaik, meskipun masalah – masalah lama seperti kelaparan dan ekonomi adalah masalah dari tahun 1998. Meskipun pada akhirnya Korea Utara pada masa Kim Jong Un melakukan uji coba nuklir yang mengakibatkan sanksi internasional dari PBB membuat ekonomi Korea Utara mulai runtuh perlahan. Selain itu Korea Utara pada masa Kim Jong Un mengalami peningkatan pertumbuhan dari segi pertanian, dimana pertanian ini menyumbangkan kontribusi besar ke pertumbuhan ekonomi Korea Utara, semenjak 2010 pertanian Korea Utara meningkat secara pesat, dimana dari segi pertanian jumlah produksinya hingga 2015 mencapai 5.07 juta ton, ini meningkat sebesar 25% dibandingkan dari 2010.

Pencapaian dari pertumbuhan pertanian ini menunjukkan dari adanya kerseriusan dari kebijakan Kim Jong Un dalam ideologi *Byungjin*, dimana data dari menteri reunifikasi korea menunjukkan tren positif dari adanya pertumbuhan ekonomi Korea Utara.

Tabel 2.3 Jumlah Keadaan Pertanian Korea Utara

*Table 1: Agricultural Situation of North Korea
(unit: million tons)*

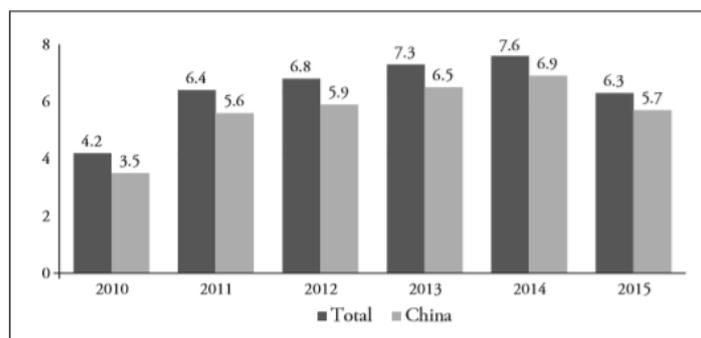
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Demand	5.46	5.34	5.40	5.43	5.37	5.49
Production	4.11	4.25	4.45	4.84	5.03	5.07
Shortage	1.35	1.09	0.95	0.59	0.34	0.42

Source: Ministry of Unification.

Selain itu yang membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi dari Korea Utara pada tahun 2010 hingga 2014 adalah adanya perdagangan dengan China yang mana sebagai patner utama Korea Utara, pertumbuhan dari Korea Utara tidak terlepas dari kontribusi dari China dimana hingga tahun 2014 Korea Utara mencapai titik perdagangan tertinggi antar kedua negara. China pun menjadi negara yang sering melakukan perdagangan dengan Korea Utara sejak masa Kim Il Sung, dan banyak memberikan dampak besar terhadap Korea Utara, meskipun pada akhirnya tren positif dari perdagangan Korea Utara dengan China berkurang pada tahun 2015 akibat adanya sanksi – sanksi yang diberikan oleh dunia internasional terhadap ekonomi Korea Utara.

Grafik 2.4 Jumlah Perdagangan Korea Utara pada 2010 - 2015

*Figure 3: Trade of North Korea
(unit: bil. US\$)*



Source: KOTRA, *The Trend of North Korean Foreign Trade*, various years.

Perdagangan antara Korea Utara dengan China pada tahun 2015 mengalami penurunan disebabkan adanya kondisi ekonomi dari Korea Utara yang melemah dan karena

ketergantungan Korea Utara ke China terus dalam hal perdagangan. Penurunan juga terjadi dikarenakan adanya ekspor utama dari Korea Utara ke China, seperti ekspor batubara ke China yang mengalami turun 7,6%, karena biaya produksi batubara anjlok.

Keberhasilan dari ideologi Kim Jong Un *Byungjin* dalam segi ekonomi dan militer memang terlihat jelas pada awal masa pemimpinannya, Korea Utara bisa membawa dampak positif dari ekonomi yang mengalami kemajuan meskipun pada akhirnya tahun 2015 hingga 2017 Korea Utara mengalami posisi yang sangat sulit karena sanksi ekonomi dan adanya penurunan dari hasil pertambangan dan manufaktur Korea Utara. Selain itu dari segi militer terutama dalam hal pembangunan senjata nuklir oleh Korea Utara dinilai cukup berhasil dimana, pada masa Kim Jong Un Korea Utara sering melakukan uji coba berupa senjata rudal balistik dan juga mengembangkan Rudal antar benua atau yang disebut Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) dan juga Hulu ledak nuklir Korea Utara.

Pada 12 Februari 2013, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketiganya di fasilitas nuklir Punggye – ri, dan Korea Utara mengklaim telah melakukan uji coba nuklirnya yang lebih ringan, meskipun menghasilkan gempa sebesar 5.1 SR. Hingga 2016 Korea masih melakukan uji coba nuklirnya yang mengakibatkan keluarnya resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang melarang untuk melakukan impor dari Korea Utara berupa barang mewah ataupun hasil dari sumber daya alam Korea Utara. Korea Utara pun berusaha untuk meminta bantuan ke Beijing untuk meringankan sanksi, meskipun akhirnya Cina berusaha untuk membantu Korea Utara dalam hal sanksi oleh PBB, meskipun adanya syarat dari Cina untuk terus melakukan proses denuklirisasi terlebih dahulu.

Cina yang memiliki peran besar dalam perdagangan Korea Utara, tidak berani untuk melobi ke Dewan Keamanan PBB karena pada waktu itu, Cina dan Amerika Serikat sedang dalam posisi perang dagang sehingga jika Cina melakukan lobi bisa membuat negaranya kewalahan untuk menghadapi Amerika Serikat.

Upaya yang dilakukan Korea Utara untuk mendapatkan penerimaan negara pasca adanya sanksi adalah dengan melakukan pembukaan tempat wisata yang tidak termasuk dalam sanksi DK PBB. Korea Utara pun membangun sebuah resort pantai di kota timur Wonsan, ini menunjukkan bahwa Kim Jon Un berusaha mendapatkan keuntungan dari adanya sanksi yang membelit Korea Utara. Korea Utara juga dilaporkan bertemu dengan perwakilan dari Rusia dan Korea Selatan untuk melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut, Korea Utara melobi Rusia dalam urusan pemasokan minyak gas cair ke Korea Utara, untuk meningkatkan

perdagangan tersebut ketika China mengurangi pemasokannya ke Korea Utara, Korea Selatan dan Korea Utara pun juga melakukan kerjasama untuk membuka kembali SEZ di Rason Utara. Meskipun Korea Utara diterpa sanksi oleh dunia internasional akan tetapi Kim Jong Un berusaha untuk melakukan kerja sama dengan negara – negara lain untuk membantu perekonomian diluar sanksi DK PPB. Hal ini dilakukan untuk membuat Korea Utara mendapatkan pendapatan dari sektor lain agar perekonomian dari Korea Utara masih bisa berjalan terus.

Denuklirisasi Korea Utara

Program Nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1950an dimana, pada tahun 1956 Uni Soviet dan Korea Utara melakukan kerjasama dalam penggunaan nuklir dalam hal damai untuk kebutuhan energi, maka dibangunlah Reaktor Nuklir selain itu juga melakukan latihan terhadap ilmuwan dan teknisi disana, untuk memberi pengetahuan dasar dari nuklir tersebut, dan setelah itu tahun 1959 Korea Utara dan Uni Soviet menandatangani kerjasama nuklir. Adanya perjanjian antara Korea Utara dengan Uni Soviet pada tahun 1959, Uni Soviet membantu Korea Utara untuk membangun sebuah Fasilitas Nuklir pertama kali di Yongbyon dengan tujuan untuk penelitian, Uni Soviet pun membantu Korea Utara untuk melakukan penelitian dan mengawasi Korea Utara dalam hal pengerjaan nuklir sebesar 5MW. Dengan adanya Fasilitas Nuklir di Yongbyon Korea Utara dapat menghasilkan Plutonium dan dapat mengembangkan senjata nuklir secara bertahap.

Meskipun Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet dan China dalam awal melakukan program nuklirnya dan batas waktu tertentu, Korea Utara berhasil mengembangkan nuklirnya tanpa bantuan luar negeri secara signifikan. Terlebih lagi ketika Korea Utara tahu China berhasil melakukan uji coba nuklirnya untuk pertama kali pada tahun 1964, Kim Il Sung berusaha untuk meminta ke Beijing untuk berbagi teknologi senjata nuklirnya setelah itu, akan tetapi pemimpin China Mao Zedong menolak dari permintaan dari Kim Il Sung, sehingga membuat hubungan Korea Utara dan China menjadi buruk.

Pada tahun 1985 Korea Utara setuju untuk perjanjian NPT, dimana nuklir Korea Utara hanya digunakan untuk energi saja tidak untuk membuat senjata. Akan tetapi meskipun Korea Utara sudah setuju untuk perjanjian NPT pada tahun 1985, Korea Utara secara diam – diam melakukan pengembangan Hulu ledak nuklir, Amerika Serikat pun menuduh bahwa Korea Utara melakukan pengembangan nuklir, dan meminta diadakan pemeriksaan di fasilitas

nuklirnya, IAEA pun melakukan pemeriksaan terhadap program nuklir dari Korea Utara berdasarkan dari perjanjian perlindungan yang Pyongyang akhiri dengan IAEA pada tahun 1992, IAEA pun menemukan bukti bahwa Korea Utara melakukan pengembangan senjata secara diam – diam, dan Korea Utara wajib untuk melaporkan dari adanya program nuklirnya ke IAEA pada tahun 1992.

Dan pada Januari 1992, Korea Utara dan Korea Selatan ingin melakukan JNCC (*Joint Nuclear Control Commission*) sebagai bentuk untuk melakukan perdamaian antara kedua negara, dimana tidak akan ada uji coba, membuat, menyimpan dan menggunakan senjata nuklir, serta melarang pemrosesan ulang nuklir dan fasilitas pengayaan uranium perjanjian itu juga mengikat kedua Korea untuk menggunakan energi nuklir hanya untuk tujuan damai. Pada awalnya perjanjian ini dipercepat dari awalnya, akan tetapi perjanjian ini tertunda hingga 19 Maret 1992, dimana adanya perbedaan pendapat antar kedua negara membuat perjanjian menjadi mundur, selain itu pada 05 Maret 1992, Korea Selatan mengumumkannya bahwa Amerika Serikat ingin berpartisipasi dalam inspeksi antar – Korea untuk membahas masalah nuklir di Semenanjung Korea

Hasil dari JNCC sendiri antar Korea Utara dengan Korea Selatan berubah menjadi JDD (*Joint Denuclearization Declaration*) dimana ini adalah sebuah deklarasi bersama antar kedua Korea Untuk menciptakan Semenanjung Korea bebas dari nuklir dan bisa melakukan inspeksi antar Korea secara bersama. Amerika Serikat yang berusaha untuk masuk ke Korea Utara untuk membuktikan adanya fasilitas senjata nuklir menawarkan ke Korea Utara untuk memberikan Dua reaktor air ringan, dengan catatan bahwa Korea Utara setuju untuk menghentikan dari operasi dan pembangunan reaktor nuklir yang dicurigai sebagai senjata nuklir. Dengan hal penawaran tersebut maka terciptanya sebuah *Agreed Framework 1994*, selain membahas tentang nuklir Korea Utara perjanjian tersebut juga menghasilkan bahwa Amerika Serikat akan membantu Korea Utara dalam hal berjanji untuk memberikan keringanan sanksi, bantuan, minyak.

Hingga akhirnya pada tahun pada tahun 2002 – 2003 Korea Utara mengakui adanya program Nuklir yang mereka jalankan secara diam – diam dan melanggar dari perjanjian *Agreed Framework*, *NPT*, dan *Inter – Korean Summit*. Ini membuat Korea Utara menjadi lebih tertutup dalam hal pengembangan nuklirnya. Untuk kembali membuat Korea Utara bisa diajak berunding dengan masalah nuklirnya, maka dibentuklah *Six Party Talks* yang terdiri dari

Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan dimana untuk membicarakan masalah nuklirnya Korea Utara dan juga sanksi – sanksi terhadap Korea Utara.

1. Awal mula dari adanya program Denuklirisasi

Pada tahun 1992 ketika Korea Utara dan Korea Selatan bertemu dan membahas tentang perdamaian dan nuklir di Semenanjung Korea, dan menghasilkan *Joint Nuclear Control Commission* dan *Joint Declaration Denuclearization* yang mana ini awal mula keinginan kedua negara untuk melakukan denuklirisasi antar kedua Korea. Hasil dari adanya deklarasi tersebut pada tahun 2000 dilakukan pertemuan pertama untuk membahas adanya program nuklir tersebut dan beberapa pembahasan terkait dengan Reunifikasi dan rencana bisnis dan pembangunan investasi untuk Korea Utara.

Pada oktober 2002, *Agreed Framework* 1994 antara Korea Utara dan Amerika Serikat mengalami kegagalan yang mana akibat dari hubungan antar kedua negara yang tidak baik, ini dikarenakan adanya tidak ada keseriusan kedua negara dimana Korea Utara tidak masih melakukan pengadaan uranium secara tertutup dan juga Amerika Serikat yang direncanakan untuk memberikan Reaktor air ringan tidak sesuai tepat waktu sehingga hubungan kedua negara menjadi tidak percaya.

Lalu rencana terbentuk *Six Party Talks* yang terdiri dari beberapa negara untuk membahas masalah nuklir di Semenanjung Korea, ingin untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Landasan dari terbentuknya dari Six Party Talks adalah dari adanya kegagalan dari *Agreed Framework* 1994 dan juga kebuntuan dari sitasui terhadap isu nuklir Korea Utara. Forum ini juga dijadikan tempat soft diplomacy untuk mencapai kesepakatan bersama karena isu nuklir yang berada di Korea Utara terbilang isu yang berat.

2. Program Denuklirisasi 2017 – 2018

Sebelumnya pada 24 Juni 2017 Moon Jae – In mengingkan Korea Utara untuk berpartisipasi dalam olimpiade musim dingin namun surat tersebut tidak mendapatkan balasan, hingga pada 9 Januari 2018 Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pertemuan pertama kali di Panmunjon untuk merundingkan beberapa hal, terkait dengan berpartisipasinya Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin 2018 di PyeongChang serta membahas masalah militer di Semenanjung Korea, dan respon positif pun dilakukan oleh Korea Utara untuk ikut serta dalam acara tersebut, Korea Utara juga setuju untuk dilakukan pertemuan antar Korea pada April 2018 untuk membahas sebuah perdamaian di Semenanjung Korea. Sebelumnya pada 2017

Korea Utara sempat melakukan beberapa kali uji coba rudal jarak jauhnya dan roketnya, dan membuat hubungan dengan Korea Utara dengan Korea Selatan menjadi lebih tidak baik, akan tetapi Korea Selatan tetap berusaha untuk menggunakan *Soft Diplomacy*.

Perubahan kebijakan dari Korea Utara yang sebelumnya lebih Agresif dalam melakukan uji coba rudal jarak jauhnya ini terjadi dikarena beberapa hal, ketika pidato tahun baru 1 Januari di Korea Utara, Kim membuat tawaran terhadap Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin dan memperbaiki relasi antar kedua negara, perubahan ini terjadi dikarena ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya di PBB, yang memberikan tekanan terhadap Korea Utara ini membuat Kim Jong Un menggunakan langkah strategis untuk memperbaiki relasi dengan Korea Selatan agar dapat bantuan Ekonomi dan memperbaiki relasi antar Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat agar bisa terlepas dari sanksi ekonomi yang menjerat Korea Utara. Karena berdasarkan sanksi – sanksi yang diterapkan terhadap Korea Utara membuat ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik, Cina yang menjadi sekutu Korea Utara harus juga melakukan sanksi international dalam pembatasan impor dan ekspor, untuk itu Kim melakukan Denuklirisasi, dan Kim Jong Un juga perlu untuk mempertahankan dari rezimnya otoriternya dalam memiliki Hulu Ledak Nuklirnya agar tidak seperti kejadian di Timur Tengah, dan Kim pun memberi izin ke IAEA untuk melakukan inspeksi disana.

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan untuk berurusan dengan Korea Utara terkait masalah denuklirisasi di Semenanjung Korea termasuk dalam agenda ketika diadakan pertemuan antar Korea 2018. Pada 27 April 2018 pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi negara dari kedua negara, Moon Jae – In dari Korea Selatan dan Kim Jong Un dari Korea Utara di “Peace House” Panmunjon untuk membahas beberapa hal, dimana terkait dengan masalah nuklir, perbaikan hubungan kedua negara dan juga kerjasama antar negara serta reunifikasi keluarga. Pertemuan tingkat tinggi ini adalah pertemuan pertama antar kepala negara, yang sebelumnya dilakukan terakhir kali pada tahun 2007. Didalam Deklarasi Panmunjon untuk perdamaian, kemakmuran, dan reunifikasi Semenanjung Korea.

USAHA KOREA UTARA UNTUK MEMPERBAIKI EKONOMI DAN KERPECAYAAN INTERANASIONAL

Pasca adanya Sanksi – Sanksi yang diterima Korea Utara ketika masa Kim Jong Un sendiri membuat Korea Utara sedikit kewalahan karena secara langsung membuat ekonomi

dari Korea Utara sendiri menjadi tersendat terutama dalam hal Ekspor Korea Utara, karena Embargo Ekonomi yang diberikan ke Korea Utara. Dalam usaha untuk memperbaiki Ekonominya Korea Utara sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk melaksanakan hal itu, Kim Jong Un sendiri memiliki beberapa cara yaitu dengan bantuan dari Korea Selatan hingga adanya sebuah janji bantuan ekonomi dan bergabung dengan Organisasi Internasional, ini juga bisa menjadi pintu buat Korea Utara untuk mendapatkan bantuan ekonomi serta memperbaiki ekonominya secara perlahan – lahan.

A. Embargo Ekonomi Korea.

Korea Utara ketika dipimpin oleh Kim Jong Un memiliki beberapa masalah yang sedang dihadapi, ketika ambisi dari Kim Jong Un dalam ideologi *Byungjin* yang mengedepankan dalam pembangunan Ekonomi serta Program Senjata Nuklir. Kim Jong Un sendiri sangat berambisi dalam menguji coba hulu ledak Nuklir Korea Utara, tanpa memperkirakan sanksi – sanksi yang dihadapi. Dan imbasnya adalah Korea Utara mendapatkan beberapa embargo ekonomi yang membuat ekonomi Korea Utara tidak stabil dan kesusahan untuk berkembang. Embargo ekonomi yang dilakukan terhadap Korea Utara sendiri dilakukan oleh beberapa negara dan Organisasi Internasional, hal ini dilakukan untuk mendesak dari Korea Utara untuk melakukan sebuah proses Denuklirisasi dan memberi pembelajaran agar tidak mengembangkan uji coba Hulu ledak Nuklir.

Embargo dari PBB sendiri sudah banyak dilakukan untuk Korea Utara untuk mencegah adanya bantuan atau suplai ke Korea Utara dalam mengembangkan uji coba nuklirnya. Embargo Ekonomi Korea Utara sendiri sudah lama diterima oleh Korea Utara sejak masa Kim Il Sung, namun masih sedikit yang diterima namun ketika Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara Korea Utara yang menggunakan ideologi *Byungjin* berusaha untuk mengembangkan hulu ledak nuklirnya bukti dari keambisiusan dari Kim Jong Un. Hingga era Kim Jong Un Korea Utara hampir menerima selusin sanksi yang diberikan oleh PBB, dari beberapa poin yang disanksi terkait dengan :

1. Perdagangan alusista militer dan teknologi serta bahan industri.
2. Pembekuan aset terkait dengan program nuklir Korea Utara.
3. Larangan Impor barang mewah ke Korea Utara.

4. Melarang bahan – bahan ekspor dari Korea Utara berupa kekayaan alam.
5. Membatasi ekspor tenaga kerja Korea Utara
6. Serta membatasi impor minyak ke Korea Utara
7. Membatasi kerjasama Ilmiah dan Teknik dengan Korea Utara.
8. Melarang impor gas alam ke Korea Utara.
9. membatasi hak menangkap ikan.

Korea Utara juga menerima Embargo Ekonomi dari beberapa negara terkait dengan program nuklirnya, ini menyebabkan Korea Utara tidak bisa melakukan perdagangan luar negeri dengan negara lain, serta ekspor dan impor. Terutama adanya Embargo dari Amerika Serikat dimana negara ini memiliki peran yang sangat kuat di Dunia Internasional. Meskipun demikian dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat akan mencabut sebagian sanksi terhadap Korea Utara sebagai imbalan atas janji untuk membekukan program nuklirnya dan membongkar sebagian fasilitasnya, namun Pyongyang secara konsisten mengingkari janjinya. Korea Utara sendiri mengandalkan dari berbagai sumber daya alam yang di ekspor ke negara – negara lain terutama partner dagang ke Cina, pendapatan Ekonomi Korea Utara sendiri dari hasil Sumber Daya Alam berupa batu bara, bijih besi, makanan laut, dan tekstil untuk ekspor, sebagian besar ke sekutunya, Cina.

Ketika sanksi diberikan Korea Utara sedang gencarnya mengedepankan pembangunan dalam segi militer, namun ini berakibatkan fatal yang berujung dengan sanksi ekonomi terutama dalam pembatasan ekspor Korea Utara, apalagi sumbangan dari penjualan Sumber Daya Alam Korea Utara sangat membantu perekonomian Korea Utara, terlebih lagi batasan Energi yang diberikan membuat Korea Utara juga kesusahan menjalankan roda industri ini menjadi sebuah masalah untuk ekonomi Korea Utara. Untuk itu perlu adanya perubahan arah dari pembangunan yang dilakukan Kim Jong Un dari Militer ke segi Ekonomi.

Korea Utara juga mendapatkan beberapa sanksi dalam hal bagian senjata dan teknologi ini dilakukan untuk mencegah dari adanya perkembangan dari program nuklir Korea Utara. Akibat dari sanksi Ekonomi dan juga pembatasan Impor dari Korea Utara membuat ekonomi Korea Utara menjadi tidak stabil, ini terbukti dari jumlah perdagangan antara Korea Utara dengan Cina dimana turun sebesar 88% akibat sanksi – sanksi yang diterapkan. Sanksi tersebut

membatasi pemerintah Korea Utara untuk mengimpor bahan baku, suku cadang, dan peralatan yang diperlukan untuk perusahaan yang dikelola pemerintah. Terutama ketika Cina ditekan oleh Amerika Serikat untuk membatasi dalam pembelian komoditas dari Korea Utara sehingga ini membuat Ekonomi Korea Utara menjadi tidak stabil dan pendapatan ekonomi Korea Utara kesusahan.

Korea Utara berusaha agar bisa lepas dari sanksi ekonomi yang diterima agar bisa menerima pendapatan lagi dari penjualan komoditas utama Korea Utara. Untuk itu perlu adanya niatan serius dari Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi. Meskipun mendapatkan sanksi dari dunia Internasional, Korea Selatan sendiri tetap akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu Korea Utara sendiri, berupa bahan makanan dan juga obat untuk kebutuhan disana.

B. Usaha Korea Untuk memperbaiki Ekonominya.

Sanksi yang diterima oleh Korea Utara sendiri membuat perekonomian Korea Utara menjadi tidak stabil apalagi dengan adanya Embargo Minyak dan pembatasan dari penjualan komoditas utama Korea Utara berupa sumber daya alam. ini membuat Korea Utara menjadi kesusahan dalam mencari pendapatan ekonominya, terutama Cina yang menjadi patner utama Korea Utara mulai ditekan oleh Amerika Serikat untuk sanksi – sanksi Korea Utara. Keinginan Pyongyang untuk bernegosiasi sering kali tampaknya didorong oleh kondisi internal: kekurangan pangan atau keputusasaan ekonomi dapat mendorong Korea Utara untuk terlibat kembali dalam pembicaraan, biasanya untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dari China atau, dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Untuk itu Korea Utara sendiri berusaha untuk memperbaiki ekonominya dengan beberapa cara yang sudah disiapkan.

Pertama, mengikuti model ekonomi Cina dan Vietnam, Korea Utara berusaha melakukan lompatan reformasi ekonomi untuk memperbaiki ekonominya akan tetapi perlu adanya rujukan untuk melakukan itu. Korea Utara sendiri berusaha untuk mengikuti Cina dan Vietnam, akan tetapi untuk mengikuti Cina ada perbedaan dalam segi ekonominya perbedaan besar diantaranya dalam industrinya, heterogenitas regional dan lainnya, selain itu perbedaan ekonomi yang sangat besar menjadi sebuah kendala untuk dilakukan oleh Korea Utara. Untuk itu model yang cocok untuk Korea Utara adalah Vietnam, apalagi Vietnam berorientasi dalam hal Ekonomi pertanian sesuai dengan Korea Utara.

Korea Utara juga dibantu oleh Korea Selatan dalam pengembangan ekonominya ini menjadi sangat penting bagi Korea Utara agar dapat bantuan untuk memperbaiki masalah ekonomi yang terjadi di Korea Utara. Kesamaan lainnya adalah kedua negara memiliki satu partai yang berkuasa di dalam pemerintahan, dan juga kedua negara pernah disanksi oleh PBB, sehingga Korea Utara ingin belajar ke Vietnam bagaimana untuk bisa memperbaiki ekonominya setelah adanya sanksi dari PBB. Bahkan Menteri Luar negeri Korea Utara berkunjung ke Vietnam untuk melakukan riset terkait dengan zona industri dan juga bertanya dengan pakar ekonomi di Vietnam. Amerika Serikat bahkan juga menyarankan untuk mengikuti model ekonomi Vietnam, pasar ekonomi sosialis, yang cocok dengan Korea Utara.

Kedua, Korea Utara juga ingin bergabung dengan IMF, World Bank dan juga Lembaga Internasional lainnya. Korea Utara sendiri ingin bergabung dengan IMF dan World Bank untuk kepentingan ekonominya dimana, ekonomi Korea Utara saat ini tidak begitu baik terlebih lagi dengan adanya sanksi ekonomi yang memberatkan Korea Utara. Korea Utara mengedepankan pembangunan ekonomi, setelah pengembangan militer dalam nuklir lebih membebaskan ekonomi negara akibat sanksi yang didapatkan. Untuk itu Korea Utara meminta bantuan Korea Selatan untuk bergabung dalam IMF, World Bank dan Lembaga Internasional lainnya. Korea Selatan melakukan kerjasama dengan Korea Utara lagi dan meningkatkan kerja sama ekonomi, dengan melanjutkan kerjasama di Kompleks Industri Kaesong. Meskipun butuh waktu yang sangat lama bagi Korea Utara untuk bergabung dalam IMF, World Bank dan Lembaga Internasional lainnya, akan tetapi dengan adanya bantuan dari Korea Selatan menjadi peluang penting untuk kesana, terlebih lagi keinginan Korea Selatan untuk mendegepkan *Soft Diplomacy* ke Korea Utara menjadi hal yang penting.

C. Memperbaiki Kepercayaan Internasional

Dengan melakukan hubungan bilateral menjadi modal penting bagi Korea Utara untuk mengembalikan kepercayaan Internasional, perubahan dari segi militer ke segi ekonomi menjadi sangat penting bagi Korea Utara. Dengan adanya keterbukaan dalam hubungan bilateral dengan antar negara menjadi sebuah modal untuk Korea utara, melakukan perbaikan dalam hal ekonomi. Korea Utara juga berusaha untuk mengikuti reformasi ekonomi dari Vietnam sehingga melakukan hubungan bilateral antar kedua negara. Terlebih lagi dengan adanya kunjungan kerja dari menteri dari kedua negara ini sebagai penanda Korea Utara mulai

terbuka dengan negara lain, meskipun sama – sama negara komunis. Selain itu dengan keinginan Korea Utara untuk masuk kedalam Lembaga Interanasional juga menjadi peluang membalikan kepercayaan internasional terlebih lagi untuk keterbukaan informasi. Apalagi adanya dukungan dari Korea Selatan untuk membantu masuk dalam Lembaga Internasional untuk memperbaiki ekonomi juga kepercayaan internasional. Dengan rencana Korea Utara untuk gabung dengan Lembaga Internasional bisa dijadikan sebuah langkah awal untuk mendapatkan kepercayaan Internasional, terutama dukungan dari beberapa negara untuk keterbukaan Korea Utara.

Korea Utara sendiri juga melakukan keterbukaan informasi dimana Korea Utara mulai terbuka dengan informasi dari luar yang masuk meskipun masih sedikit ini mengindikasikan adanya arah perubahan yang lebih baik untuk Korea Utara, dengan adanya keterbukaan informasi luar ke Korea Utara menjadi hal penting. Terlebih lagi untuk Dunia Internasional dengan adanya arah perubahan dari militer ke ekonomi serta adanya keterbukaan informasi dan melakukan hubungan bilateral dengan negara lain ini menjadi sebuah hal penting untuk Korea Utara dalam perbaikan ekonomi dan juga kepercayaan Internasional.

Langkah yang diambil oleh Korea Utara dalam melakukan kerjasama ekonomi Korea Utara dengan Vietnam menjadi sebuah langkah yang bagus, terlebih lagi adanya dukungan dari Korea Selatan untuk membantu masuk ke dalam Lembaga Internasional menjadi sebuah kesempatan untuk memperbaiki Ekonomi serta Kepercayaan Internasional.

Kesimpulan

Usaha Korea Utara untuk memperbaiki Ekonomi dan Kepercayaan Internasional sudah dilakukan sejak era Kim Il Sung Hingga Kim Jong Un, beberapa langkah juga dilakukan untuk memperbaiki ekonomi akan tetapi kendala dalam memperbaiki ekonomi sendiri terjadi akibat adanya kepentingan dalam Militer, Nuklir menjadi salah satunya dimana nuklir membuat Korea Utara menjadi tidak Stabil dalam hal Ekonomi, karena membuat Korea Utara terkena sanksi dari Dunia Internasional dan juga embargo dari negara lain. Ini yang membuat Dinasti Kim kesusahan terlebih lagi ketertarikan terhadap Nuklir sangat kuat sehingga Korea Utara mengabaikan rakyatnya yang kesusahan dan mengutamakan pengembangan program Nuklir. Meskipun demikian Korea Utara pada era Kim Jong Un berusaha untuk memperbaiki Ekonomi pada awalnya Kim Jong Un lebih tertarik terhadap pengembangan Nuklir akan tetapi adanya sanksi ekonomi dan tidak pasti dari Cina sebagai patner utama Korea Utara yang juga

menerapkan sanksi dan mengurangi beberapa Impor dan Ekspor membuat Kim Jong UN berpikir dua kali untuk mengutamakan Ekonominya. Adanya juga masukan dari Korea Selatan dan Korea Utara untuk kerja sama membangun era baru membuat Korea Utara mau untuk melakukan Denuklirisasi dengan bantuan dari Korea Selatan, terlebih lagi adanya sebuah janji – janji bantuan ekonomi serta bantuan memperbaiki kepercayaan Internasional membuat Korea Utara tertarik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritias*. . Bandung: CV. Sinar Baru.

Mas'ood, M. (1990). *LMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.

Beal, T. (2005). *North Korea The struggle Against American Power*. London: Pluto Press.

Jurnal :

Babson, B. O. (2016). The North Korean Economic System: Challenges and Issues . *International Journal of Korean Studies* • Vol. XX, No. 1 , 149 - 175.

Febriani, S. I. (2017). *pengaruh Ideologi Juche terhadap perekonomian di Korea Utara pada masa kepemimpinan King Jong-II*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Goto, F. (1990). *Estimates of the North Korean Gross Domestic Product*. Kyoto: Kyoto Sangyo University Press.

Kim, C. (1988 - 1989). NORTH KOREAN JOINT VENTURE LAWS. *CALIFORNIA WESTERN INTERNATIONAL LAW JOURNAL, VOLUME 19 1988-1989 NUMBER 2*, 175 - 228.

Yong, P. H. (2004). North Korea in the 1950s: The Post Korean War Policies and Their Implications . *The Korean Journal of Internasional Relations, Volume 44, Number 5, 2004*, 215 - 234.

Website

Admin. (2015). *Kim Jong Un Visit Reconstructed Pyongyang Revolutionary Site*. Seoul: Rodong Sinmun.

Albert, E. (2019, Juli 16). *What to Know About Sanctions on North Korea*. Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/what-know-about-sanctions-north-korea>

Anonim. (2004, Januari 6). *Timeline: North Korea's nuclear weapons development*. Diambil kembali dari CNN WORLD: <http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/east/08/20/nkorea.timeline.nuclear/>

- Byung - Yeon, K., Keun , L., & Lee, I. (2014). *THE POSSIBILITY OF ECONOMIC REFORM IN NORTH KOREA*. Seoul: Researchgate.net.
- Choe, H. S. (2019, April 18). *North Korea's State-Run Economy Falters Under Sanctions, Testing Elite Loyalty*. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/04/18/world/asia/north-korea-economy-sanctions.html>
- Chong – Sik Lee. (1965). *“Stalinism in the East : Communism in North Korea”*. . New Jersey: Englewood Cliffs.
- Costa, A. N. (2018, Oktober 12). *What would it take for North Korea to join the IMF?* Diambil kembali dari BCC.com: <https://www.bbc.com/news/business-45662339>
- Crf. (-, - -). *North Korean Nuclear Negotiations 1985 - 2019*. Diambil kembali dari crf.org: <https://www.crf.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations>
- Davenport, K. (2016). *UN Security Council Resolutions on North Korea*. Washington: Arms Control Association.
- Davenport, K. (2018, June 21). *The Six-Party Talks at a Glance*. Diambil kembali dari The Arms Control Association: <https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks>
- Davenport, K. (2019, Januari 31). , *Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy*. Diambil kembali dari armscontrol.org: <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>
- Dürkop, C., & Il, Y. M. (2011). *North Korea after Kim Jong il. Political and social Perspectives ahead of the expected change of Power*. -: KAS.
- Dürkop, C., & Yeo, M. I. (2011). *North Korea after Kim JoNg il*. -: KAS INTERNATIONAL REPORTS .
- Dwivedi, G. (2018). *Historic Summit at Panmunjom*. -: Institute for Defence Studies and Analyses.
- Ghazi., F. M. (2017, - -). *Kim Jong Un dan Ambisi Rudal Balistik Nuklir Antar – Benua*. . Diambil kembali dari qureta.com: <https://www.qureta.com/post/kim-jong-un-dan-ambisi-membangun-rudal-antarbenua>
- Haas, B., & Borger, J. (2018, Mei 24). *North Korea 'destroys' nuclear test site as world's media watches*. Diambil kembali dari theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/24/north-korea-destroys-nuclear-test-site-as-worlds-media-watches>
- Hun, C. S. (2019, Mei 17). *South Korea Announces \$8 Million Aid Package for North*. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia/north-korea-aid-south.html>
- Ji, D. (2018, September 26). *North Korea wants to join IMF and World Bank, pursue economic reform: Moon*. Diambil kembali dari NKNews.org: <https://www.nknews.org/2018/09/north-korea-wants-to-join-imf-and-world-bank-pursue-economic-reform-moon/>
- Jo, D. (2011). *A Strategy for the Advancement of the North Korean Economy*. Seoul: The East Asia Institute(EAI).
- Jo, D. (2017). *The Kim Jong Un Regime and the Future Security Environment Surrounding the Korean Peninsula*. Tokyo: The National Institute for Defense Studies .

- Kang, S. -G. (2002). . *Seon-gun-si-dae-ui jo-gug-eul ga-da. [Going to the Homeland of the Military-first Era]* . Pyongyang: The Pyongyang Press.
- Kelly, R. (2018, Agustus 3). *A New Economy for North Korea*. Diambil kembali dari cigionline.org: <https://www.cigionline.org/articles/new-economy-north-korea>
- Kim, B. -H. (2005). *Seon-gun-eu-lo wi-lyeog-tteol-chi-neun ganggug. [Strong Nation through Military-first]* . Pyongyang: The Pyongyang Press.
- Kuhn, A. (2019, Juni 9). *Why South Korea Is Sending \$8 Million In Food Aid To North Korea*. Diambil kembali dari npr.org: <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/06/09/730441007/why-aid-wont-fix-north-koreas-recurring-food-shortages>
- Kyong, P. C. (2019, Januari 10). *Kim and Moon want to resume joint Korean projects – but the US has to agree first*. Diambil kembali dari scmp.com: <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2181551/kim-and-moon-want-resume-joint-korean-projects-us-has-agree>
- Nations, U. (2006). *"Security Council imposes sanctions on DPR Korea after its claimed nuclear test*. Wahsington: UN.
- NTI. (2018, Oktober -). *NORTH KOREA*. Diambil kembali dari NTI.org: <https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/>
- Ogden, R. -y. (2012). *"Understanding North Korea's Economic Crisis," Asian Economic*. New York: The Earth Institue at Columbia Unviersity and Massachusetts Intitute of Technilogu.
- Onchi, Y., & Nagai, O. (2018, September 02). *Kim struggles to revive North Korean economy battered by sanctions*. Diambil kembali dari Nikkei Asian Review: <https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/Kim-struggles-to-revive-North-Korean-economy-battered-by-sanctions>
- Park, S. -B. (2003). *The North Korean Economy: Current Issues and Prospects*. Ottawa: Carleton University.
- Pearson, J., & Choi, H. (2018, November 7). *As North Korea ponders economic reform, its top diplomat to visit Vietnam*. Diambil kembali dari reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-vietnam-diplomacy/as-north-korea-ponders-economic-reform-its-top-diplomat-to-visit-vietnam-idUSKCN1NC1QK>
- Roy, D. (2018, Januari 7). *Is a full oil embargo against North Korea even possible?* Diambil kembali dari scmp.org: <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2127071/full-oil-embargo-against-north-korea-even-possible>
- Sang, H. C. (2019, April 18). *North Korea's State-Run Economy Falts Under Sanctions, Testing Elite Loyalty*. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/04/18/world/asia/north-korea-economy-sanctions.html>
- Seong-Whun, C. (2013). *The Kim Jong-un Regime's "Byungjin" (Parallel Development) Policy of Economy and Nuclear Weapons and the 'April 1st Nuclearization Law'*. Seoul: Korea Institute for National Unification.
- T., K. S. (1963). *North Korea's Industrial Development during the post war period*. New York: North Korea Today.

- Talmadge, E. (2019, Februari 14). *North Korea exploring sanctions-proof energy technologies*. Diambil kembali dari PHYS.ORG: <https://phys.org/news/2019-02-north-korea-exploring-sanctions-proof-energy.html>
- Tweed, D. (2019, Februari 28). *What You Need to Know About North Korea and Sanctions: QuickTake*. Diambil kembali dari The Washington post: https://www.washingtonpost.com/business/what-you-need-to-know-about-north-korea-and-sanctions-quicktake/2019/02/26/0bacc9b0-39ae-11e9-b10b-f05a22e75865_story.html
- Yasinta, V. (2018, 01 09). *Hasil Penting Pertemuan Korut-Korsel, Olimpiade dan Perdamaian*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/09/14213571/hasil-penting-pertemuan-korut-korsel-olimpiade-dan-perdamaian>